ABSTRAK

Kajian dilakukan untuk menakar apakah kebijakan penyelenggara negara dalam mengelola pemerintahan dapat digugat keperdataannya melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit) dalam rangka pengembangan hak warga negara berdasarkan sistem hukum Indonesia. Permasalahan dalam kajian ini ialah apakah kebijakan penyelenggara negara dalam mengelola pemerintahan dapat digugat keperdataannya melalui gugatan warga negara (citizen lawsuit), bagaimana akibat hukum gugatan warga negara (citizen lawsuit) yang diajukan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum dalam sistim hukum Indonesia, serta bagaimana konsep gugatan keperdataan warga negara (citizen lawsuit) atas tindakan penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka pengembangan hak warga negara berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Metode yang digunakan dalam disertasi ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif didukung dengan perbandingan hukum. Sumber data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder yaitu berupa bahan hukum primer dalam bentuk putusan-putusan pengadilan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan (library research). Analisis terhadap data-data tersebut diatas menggunakan metode analisis deskriptif, kualitatif, dan argumentatif. Peraturan perundang-undangan sebagai sumber analisis, apabila adanya kesenjangan, maka menjadi temuan yang akan diberi masukan oleh peneliti.

Dari hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa: (i) kebijakan penyelenggara negara dalam mengelola pemerintahan dapat digugat keperdataannya melalui mekanisme gugatan warga negara (Citizen Lawsuit) apabila adanya; (a) kesalahan peraturan perundang-undangan dan produk dibawahnya/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berakibat merugikan terhadap warga negara, sehingga perlu diamandemen atau dicabut, (b) ketiadaan produk hukum yang mengatur suatu permasalahan, (c) kesalahan pelaksanaan administrasi yang dilakukan pejabat negara, dan (d) bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; (ii) akibat hukum citizen lawsuit yang diajukan dan dimenangkan warga negara melalui Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung melakukan pembatasan; (a) gugatan citizen lawsuit tak boleh meminta ganti kerugian dan hanya boleh meminta dikeluarkannya kebijakan secara umum, (b) tak boleh membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara karena kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; dan (c) tak boleh membatalkan undang-undang karena kewenangan Mahkamah Konstitusi; (iii) Konsep citizen lawsuit sebagai pemenuhan hak konstitusional warga negara atas tindakan penyelenggara negara yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam rangka pengembangan hak warga negara harus memenuhi konsep demi kepentingan public, sehingga hukum yang mengaturnya adalah bersifat hukum publik, dan selanjutnya terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan penguasa/penyelenggara negara (Onrechtmatig Overheidsdaad) tersebut haruslah dimaknai sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut “Tindakan” yaitu berupa perbuatan penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang pertanggungjawabannya dapat dimintakan Upaya Administratif melalui PTUN.

Kata kunci: citizen lawsuit, gugatan, warga negara, pengadilan negeri, dan perbuatan melawan hukum.

ABSTRACT

The study was conducted to measure whether the policies of state administrators in managing the government can be sued by civil lawsuits through citizen lawsuits in the context of developing citizen rights based on the Indonesian legal system. The problem in this study is whether the policy of state administrators in managing the government can be sued by civil law through a citizen lawsuit, what are the legal consequences of a citizen lawsuit filed as a lawsuit against the law in the Indonesian legal system, and how the concept of a lawsuit citizen lawsuits for the actions of state officials who commit acts against the law in the context of developing citizens' rights based on the Indonesian legal system.

The method used in this dissertation is descriptive analysis with a normative juridical approach supported by comparative law. The data sources consist of two, namely primary data and secondary data in the form of primary legal materials in the form of court decisions. The data collection technique that will be used in this study uses library research techniques. The analysis of the above data uses descriptive, qualitative, and argumentative analysis methods. Legislation as a source of analysis, if there is a gap, it becomes a finding that will be given input by researchers.

From the results of the research, it can be concluded that: (i) the policies of state administrators in managing the government can be sued by civil lawsuits through a citizen lawsuit mechanism if they exist; (a) errors in laws and regulations and the products under them/contrary to laws and regulations that result in harm to citizens, so that they need to be amended or revoked, (b) the absence of legal products that regulate a problem, (c) errors in administrative implementation carried out state officials, and (d) contrary to the general principles of good governance; (ii) as a result of a citizen lawsuit filed and won by a citizen through the District Court, the Supreme Court imposes restrictions; (a) citizen lawsuits may not ask for compensation and may only request the issuance of general policies, (b) may not cancel State Administrative Decisions due to the authority of the State Administrative Court; and (c) may not cancel the law because of the authority of the Constitutional Court; (iii) The concept of a citizen lawsuit as the fulfillment of the constitutional rights of citizens for the actions of state officials who commit acts against the law in the context of developing the rights of citizens must fulfill the concept for the sake of the public interest, so that the laws governing it are public law, and subsequently against unlawful acts committed carried out by the authorities/state administrators must be interpreted as Government Administration Actions, hereinafter referred to as “Actions”, namely in the form of actions by other state administrators to perform and/or not take concrete actions in the framework of administering the government whose accountability can be requested Administrative Efforts through the Administrative Court.

Keywords: citizen lawsuit, lawsuit, citizen, court, and acts against the law.